

K.1. KONDISI UMUM

K.1.1. Data Administratif

No.	Keterangan
1.	Nama Kabupaten/Kota :
2.	Luas Wilayah : Ha
3.	Luas Wilayah Permukiman : Ha
4.	Persentase Luas Wilayah Permukiman terhadap Luas Wilayah : %
5.	Jumlah Penduduk : Jiwa
6.	Jumlah Rumah Tangga : RT
7.	Besaran PDRB Daerah Tahun 2009 : Rp.
8.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2009 :

K.1.2. Mata Pencaharian dan Tingkat Penghasilan Penduduk

No.	Keterangan
1.	Mata pencaharian utama penduduk (Misal: nelayan, petani, buruh, swasta, dan lain-lain):
	a) = %
	b) = %
	c) dst = %
	Jumlah = 100 %
2.	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) : Rp.
3.	Rata-rata penghasilan Rumah Tangga : Rp.
4.	Jumlah Rumah Tangga berdasarkan tingkat penghasilan sebagai berikut:
	a) Kurang dari Rp. 1.000.000,- = RT
	b) Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.700.000,- = RT
	c) Rp. 1.700.001,- s/d Rp. 2.500.000,- = RT
	d) Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.500.000,- = RT
	e) Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 4.500.000,- = RT
	f) Lebih dari Rp. 4.500.000,- = RT
	Jumlah = RT

K.1.3. Kelembagaan Perumahan dan Permukiman

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

No.	Keterangan
1.	Nama Instansi/Dinas :
2.	Nama Sub/Bagian/Divisi :
3.	Alamat Kantor :
4.	Alamat E-mail :
5.	Alamat website/situs :
6.	No. Telepon :
7.	No. Fax :

K.1.4. Stakeholder Pembangunan Perumahan dan Permukiman

a. Pengembang/Developer Terdaftar

No.	Pengembang	Jumlah	Jumlah Anggota (bila berbentuk asosiasi/organisasi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perum Perumnas		
2.	REI		
3.	APERSI		
dst	...		

b. Kelompok Masyarakat Yang Memiliki Program/Kegiatan Bidang Perumahan

No.	Kelompok Masyarakat	Jumlah Anggota	Nama Program/Kegiatan Bidang Perumahan	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paguyuban ...			
2.				
dst	...			

c. Lembaga Keuangan Bank/Non Bank/Mikro

No.	Nama Lembaga	Kategori Lembaga Gunakan (0)			Alamat Lengkap	No. Telp. /Fax.	Email	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Status Kepemilikan	Nilai Aset	Jumlah Nasabah/ Anggota
		Bank	Non Bank	Mikro							Rp	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.												
2.												
dst	...											

d. Perusahaan Penyelenggara Corporate Social Responsibility (CSR)

No.	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	No. Telp. /Fax.	Email	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Status Perusahaan *)	Nilai Aset Rp	Jumlah Karyawan	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
dst	...									

*) Pilih salah satu: Lokal/Nasional/Internasional

...	Tahun CSR	Jumlah Alokasi CSR	Jumlah Rumah yang Difasilitasi
		Rp	unit
(10)	(11)	(12)	(13)

K.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

K.2.1. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)/ RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)?
 a. Ada
 b. Dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
2. Jika mempunyai RUTR/ RTRW, apakah pelaksanaannya didukung oleh adanya Properda (Program Peraturan Daerah)/ Poldas (Pola Dasar)?
 a. Benar
 b. Properda dan Poldas sedang dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman? (Jika ada, maka RPJMD 2010-2014 dilampirkan dalam bentuk *hardcopy/softcopy* khusus bagian yang terkait perumahan saja)
 a. Ada
 b. Dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
4. Jika mempunyai RPJMD 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman, apakah sudah didukung dengan adanya RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah)?
 a. Sudah
 b. Sedang dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
5. Jika sudah didukung dengan RP4D, apakah RP4D tersebut telah mengakomodasi berbagai kepentingan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat (*stakeholders*) pada sektor permukiman?
 a. Sudah
 b. Belum
 c. Tidak tahu
 d. Lainnya (tuliskan) : ...
6. Pada penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, apakah ada permasalahan yang timbul?
 a. Ada
 b. Tidak ada
 c. Tidak tahu
 d. Lainnya (tuliskan) : ...
7. Jika ada, apa permasalahan tersebut?
 a. Sulitnya penyediaan lahan bagi kawasan perumahan dan permukiman
 b. Kurangnya kordinasi antara kelembagaan yang terkait
 c. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, bagi para *stakeholders*
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
8. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, apakah Kabupaten/Kota sudah pernah mendapatkan pendalaman/ sosialisasi dari Deputi Bidang Pengembangan Kawasan?
 a. Sudah
 b. Belum
 c. Tidak tahu
 d. Lainnya (tuliskan) : ...

9. Pada saat ini apakah kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan zona permukiman/ perumahan yang telah ada pada RTRW Kabupaten/Kota?
- a. Sudah c. Tidak tahu
 b. Belum d. Lainnya (tuliskan) : ...
10. Jika belum sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai zona perumahan dan permukiman yang tertuang pada RTRW
 b. Adanya perubahan fungsi kawasan perumahan dan permukiman
 c. Kebutuhan akan perumahan semakin tidak terkendali, dikarenakan adanya urbanisasi yang semakin meningkat
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
11. Bagaimana perkiraan pada tahun-tahun mendatang mengenai penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- a. Akan mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai perumahan
 b. Tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat akan perumahan, karena terjadi *backlog*
 c. Semua jawaban benar
 d. Lainnya (tuliskan) : ...
12. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota memanfaatkan sumber dana yang berasal dari:
- a. APBD c. Swadaya
 b. *Loan* (pinjaman) dari badan/bank luar negeri d. Swasta
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
13. Untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, apakah telah dilakukan survai kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengetahui kebutuhan akan perumahan?
- a. Sudah d. Tidak tahu
 b. Sedang dilakukan survai e. Lainnya (tuliskan) : ...
 c. Belum
14. Apakah Kabupaten/Kota sudah mempunyai lokasi KASIBA (Kawasan Siap Bangun)/ LISIBA (Lingkungan Siap Bangun)/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana?
- a. Ada c. Tidak tahu
 b. Tidak ada d. Lainnya (tuliskan) : ...
15. Jika memiliki lokasi KASIBA, Kawasan Khusus, lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana, berapa jumlah lokasi kawasan tersebut?
- Jumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
Jumlah lokasi yang belum ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
16. Jika tidak mempunyai KASIBA/ LISIBA/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana bagi perumahan dan permukiman, upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- a. Melakukan perubahan fungsi lahan d. Semua jawaban benar
 b. Melakukan pembelian lahan e. Lainnya (tuliskan) : ...
 c. Melakukan *ruislag* (tukar guling) lahan

17. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Baik d. Tidak tahu
 b. Cukup e. Lainnya (tuliskan) : ...
 c. Sangat kurang
18. Bentuk kendala apa saja yang terjadi pada penyediaan jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait
 b. Kurangnya dukungan dalam penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur
 c. Kawasan perumahan dan permukiman terlalu jauh dari akses induk utama jaringan PSU
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
19. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, bentuk ketidak-terpaduan pembangunan sarana dan prasarana seperti apa yang muncul sehingga memberikan dampak negatif?
- a. Akses jalan yang arus kendaraannya mengakibatkan kemacetan dengan lokasi perumahan lain
 b. Drainase/ saluran pembuangan air rumah tangga dan badan jalan yang mengakibatkan banjir pada lokasi perumahan lain
 c. Lokasi pembuangan sampah yang mengganggu lokasi perumahan lain
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
20. Solusi apa saja yang telah/saat ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam penyediaan jaringan sarana/prasarana umum pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait agar terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar program penyediaan sarana/ prasarana umum
 b. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang mampu mendukung Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam hal penyediaan dana
 c. Membuat perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang letaknya tidak jauh dari akses induk prasarana dan sarana umum
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
21. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten/Kota, apakah komposisi jumlahnya sudah sesuai dengan SK Menpera Nomor: 04/KTPS/BK4N/1995 Tgl 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, yaitu dengan komposisi 1 rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana?
- a. Sudah c. Tidak tahu
 b. Belum d. Lainnya (tuliskan) : ...
22. Jika sudah, apakah ada kendala yang timbul berkaitan dengan pengaturan mengenai komposisi jumlah rumah tersebut?
- a. Ada c. Tidak tahu
 b. Tidak ada d. Lainnya (tuliskan) : ...
23. Jika ada, apa kendala tersebut?
- a. Koordinasi yang kurang harmonis antar lembaga terkait (*stakeholders*)
 b. Pengembang perumahan kurang berminat untuk membangun rumah sederhana
 c. Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan komposisi
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...

K.2.2. Penyiapan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)

1. Sudah adakah dokumen yang mengatur perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berbasis kawasan di Kabupaten/Kota?
 a. Ya (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 2*) b. Tidak (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 9*)
2. Apakah nama dokumen yang dimaksud tersebut?
 a. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D)
 b. Dokumen Rencana Lainnya, sebutkan: ...
Mohon untuk dapat melampirkan softcopy dokumen yang dimaksud.
3. Apakah dokumen tersebut sudah berkekuatan hukum/sudah disahkan?
 a. Belum
 b. Sudah dalam bentuk:
 b.1. Perda, Nomor:
 b.2. SK Bupati, Nomor:
 b.3. SK Walikota, Nomor:
 b.4. Lainnya : Nomor:
4. Masa berlaku Dokumen tersebut:
 a. < 5 tahun b. 5 - 10 tahun c. > 10 tahun
5. Instansi yang memiliki peran utama dalam penyusunan dokumen tersebut adalah:
 a. Bappeda/Bappeko d. Dinas Tata Kota
 b. Dinas Kimpraswil e. Instansi/Dinas lainnya (tuliskan) : ...
 c. Dinas PU
6. Adakah keterlibatan *stakeholder* lain saat proses penyusunan dokumen perumahan dan permukiman tersebut?
 a. Ada, yaitu: asosiasi dunia usaha/ akademisi/ LSM/ tokoh masyarakat **(coret yang tidak perlu)*
Lainnya (tuliskan) :
 b. Tidak ada
7. Apakah dalam dokumen tersebut sudah mengindikasikan lokasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan?
 a. Ya b. Tidak
8. Apakah pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota saat ini sudah sesuai dengan rencana pengembangan kawasan yang tertuang dalam dokumen tersebut?
 a. Ya b. Tidak

Lanjutkan ke pertanyaan no. 12

-
9. Apakah Kabupaten/Kota sedang merencanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)?
 a. Ya (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 10*) b. Tidak (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 11*)
 10. Sudah sejauh mana pencapaian kemajuan penyusunan RP4D di Kabupaten/Kota?
 a. Sudah mengikuti sosialisasi mengenai RP4D
 b. Sudah membentuk Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) penyusunan RP4D
 c. Sudah melakukan pendataan untuk penyusunan RP4D
 d. Sudah menyusun naskah akademis rancangan RP4D
 e. Sudah dalam usulan untuk ditetapkan sebagai produk hukum

11. Pendekatan/instrumen apa yang digunakan saat ini dalam penetapan kawasan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berskala kawasan?
- a. Berdasarkan lokasi yang sudah lebih dahulu ditetapkan Bupati/Walikota
 - b. Berdasarkan lokasi yang diusulkan atas prakarsa pengembang
 - c. Tidak ada (terjadi sendiri atas prakarsa masyarakat sendiri)
 - d. Lainnya (tuliskan) : ...

Lanjutkan ke pertanyaan no. 12

12. Apakah di Kabupaten/Kota sudah pernah atau sedang melaksanakan program pengembangan kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Ya (sudah pernah/sedang melaksanakan)
 - b. Masih dalam tahap perencanaan
 - c. Belum sama sekali
 - d. Lainnya (tuliskan) : ...
13. Apakah di Kabupaten/Kota sudah terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang telah terbangun atau sedang dibangun?
- a. Ya
 - b. Tidak
14. Bagaimana pola penanganan yang dilaksanakan guna mengendalikan aspek keserasian kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- a. Dengan menerapkan pola pembangunan perumahan menurut skema 1-3-6 (1 rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah sederhana) pada sebagian kawasan perumahan
 - b. Dengan menerapkan pola pembangunan perumahan menurut skema 1-3-6 (1 rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah sederhana) pada keseluruhan kawasan perumahan di daerah
 - c. Dengan menerapkan pola lain, yaitu : ...
 - d. Sampai dengan saat ini belum ada perencanaan ke arah tersebut
15. Bagaimana pola penanganan yang dilaksanakan guna mengendalikan aspek keterpaduan prasarana kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- a. Memadukan pembangunan perumahan dengan RTRW dan RTRWK
 - b. Memberikan bantuan pembangunan prasarana primer pada kawasan perumahan
 - c. Melakukan penegakan aturan yang ketat untuk menjamin ketersediaan layanan prasarana pada kawasan perumahan
 - d. Dengan menerapkan pola lain, yaitu : ...
 - e. Sampai dengan saat ini belum ada perencanaan ke arah tersebut

K.2.3. Penerapan Konsep Kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang

1. Apakah aparat Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memahami Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang?
- a. Sudah
 - b. Belum
2. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerapkan ketentuan pelaksanaan lingkungan hunian berimbang?
- a. Sudah
 - b. Belum
3. Apakah ada rencana Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerapkan konsep kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang?
- a. Ada
 - b. Tidak
4. Dimana Pemerintah Kabupaten/Kota akan mencantumkan ketentuan tentang kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang?
- a. Rencana Tata Ruang
 - b. RP4D
 - c. SK Bupati/Walikota/SK Kepala Daerah
 - d. Peraturan Daerah
 - e. Lainnya (tuliskan) : ...
 - f. Belum

5. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang di Kabupaten/Kota?
- a. Sudah menentukan zona-zona perumahan mewah, menengah, dan sederhana
 b. Belum
6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyusun program perumahan dan permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui mekanisme subsidi silang (bantuan dari kelompok mampu kepada yang kurang mampu)?
- a. Sudah b. Belum
7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerapkan Ketentuan Keserasian Kawasan, antara lain: menyediakan kebutuhan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau?
- a. Sudah b. Belum
8. Jika sudah, apakah Ruang Terbuka Hijau di dalam kapling < 10% ?
- a. Ya b. Tidak
9. Berada persentase Ruang Terbuka Hijau publik dalam kawasan?
- a. Kurang dari 20% b. Lebih dari 20%
10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota perlu penjelasan atau Peraturan Menteri tentang Ruang Terbuka Hijau perumahan dan permukiman agar lebih jelas dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman?
- a. Ya b. Tidak

K.2.4. Pendanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

- a. Alokasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 - 2010

Uraian	Tahun Anggaran					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total APBD						
Alokasi Pembangunan Perkim *)						
% Alokasi Pemb. Perkim terhadap Total APBD						

*) Alokasi yang terkait dengan pembangunan rumah (tidak bersusun maupun bersusun) dan perumahan dengan PSU

ü Prasarana: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan

ü Sarana:

§ Perdagangan: pasar, pertokoan, swalayan, dll

§ Pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA

§ Peribadatan: Mushala, Masjid, Gereja, Vihara, Pura, dll

§ Kesehatan: Puskesmas, Posyandu, Apotik, Dokter, Rumah Sakit, dll

§ Umum Pemerintahan: Pos Jaga, Ruang Serba Guna, Pemadam Kebakaran, Parkir, RTH, Rekreasi, Olah Raga

ü Utilitas: listrik, telekomunikasi, gas

- b. Jenis Kegiatan dan Alokasi APBD Kab/Kota per Jenis Kegiatan Pembangunan Perkim

No.	Jenis Kegiatan	T.A. 2005		T.A. 2006		T.A. 2007		T.A. 2008		T.A. 2009		T.A. 2010	
		Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(8a)	(8b)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah													

K.2.5. Kerja Sama Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Kerja sama pembangunan perumahan dan permukiman dengan status telah selesai/sedang berlangsung/dalam perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi/Lembaga lainnya.

No	Nama Instansi/Lembaga	Judul Kerjasama	Status Kerjasama (Gunakan tanda 0)			No. Perjanjian Kerjasama	Hasil Akhir
			telah selesai	Sedang berlangsung	dalam perencanaan		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
1.							
2.							
dst.							

K.2.6. Perijinan Terkait Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Jenis, biaya, dan waktu pengurusan perijinan pembangunan perumahan, misalnya: Biaya Ijin Lokasi, Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Biaya Sertifikasi Tanah, Biaya Hak Guna Bangunan (HGB), dan lain sebagainya.

No.	Jenis Perijinan	Nama Instansi Pengurusan	Biaya	Rata-rata Waktu Pengurusan
			Rp.	hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				

K.3. DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

K.3.1. Kondisi Eksisting Perumahan

a. Bangunan Rumah Susun dan Tidak Bersusun

(i) Fungsi Rumah

No	Fungsi Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Tinggal	
2.	Rumah Campuran	
	Total	

Sumber: ...

(ii) Tipe Rumah

No	Tipe Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Sederhana	
2.	Rumah Menengah	
3.	Rumah Mewah	
	Total	

Sumber: ...

(iii) Jenis Bangunan Rumah

No	Jenis Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
2.	Rumah Semi Permanen	
3.	Rumah Tidak Permanen	
	Total	

Sumber: ...

(iv) Jenis Fisik Bangunan Rumah

No	Jenis Fisik Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Tidak Bersusun	
	a) Rumah Tidak Panggung	
	b) Rumah Panggung	
	c) Rumah Terapung	
2.	Rumah Susun/Apartemen	
	Total	

Sumber: ...

(v) Kelengkapan Rumah

No	Kelengkapan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Lengkap	
2.	Rumah Tidak Lengkap	
	Total	

Sumber: ...

(vi) Jumlah Lantai Bangunan Rumah

No	Jumlah Lantai Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah memiliki satu lantai	
2.	Rumah memiliki dua lantai	
3.	Rumah memiliki lebih dari dua lantai	
	Total	

Sumber: ...

(vii) Jumlah Kepala Keluarga per Bangunan Rumah

No	Jumlah Kepala Keluarga dalam Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah dengan 1 (satu) KK	
2.	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	
	Total	

Sumber: ...

(viii) Kondisi Fisik Bangunan Rumah

No	Kondisi Fisik Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Baik	
2.	Sedang	
3.	Rusak	
4.	Rusak Berat	
	Total	

Sumber: ...

b. Prasarana Pendukung

(i) Sumber Air Bersih

No	Sumber Air Bersih	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Perpipaan-PAM	
2.	Perpipaan-Non-PAM	
3.	Non-Perpipaan-Alam	
4.	Non-Perpipaan-Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(ii) Ketersediaan Sanitasi

No	Ketersediaan Sanitasi	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah dengan Sanitasi Milik Sendiri	
2.	Rumah dengan Sanitasi Milik Bersama	
3.	Rumah dengan Sanitasi Komunal/Umum	
4.	Rumah dengan Sanitasi Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

c. Cara Perolehan, Kepemilikan, dan Kepenghunian Rumah

(i) Cara Perolehan Rumah

No	Cara Perolehan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah yang dibeli dari Pengembang	
2.	Rumah yang dibeli melalui Koperasi/Yayasan	
3.	Rumah yang dibeli dari Perorangan	
4.	Rumah yang dibeli Bukan Baru	
5.	Rumah yang dibangun sendiri/swadaya	
6.	Rumah yang diperoleh dari Alokasi Administrasi	
7.	Rumah yang diperoleh dengan Cara Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(ii) Cara Pembayaran dalam Perolehan Rumah

No	Cara Pembayaran dalam Perolehan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Tunai	
2.	Angsuran KPR/KPA	
3.	Angsuran Bukan KPR/KPA	
4.	Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(iii) Status Kepemilikan Bangunan Rumah

No	Status Kepemilikan	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Milik Sendiri	
2.	Rumah Bebas Sewa	
3.	Rumah Kontrak/Sewa	
4.	Rumah Dinas	
5.	Rumah Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(iv) Jenis Bangunan Rumah dan Status Kepenghunian

No	Status Kepenghunian	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
	a) Dihuni	
	b) Kosong	
	Jumlah	
2.	Rumah Semi Permanen	
	a) Dihuni	
	b) Kosong	
	Jumlah	

No	Status Kepenghunian	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
3.	Rumah Tidak Permanen/Darurat	
	a) Dihuni	
	b) Kosong	
	Jumlah	
	Total	

Sumber: ...

(v) Status Kepemilikan Bangunan Rumah yang Dihuni

No	Status Kepemilikan Rumah yang Dihuni	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	• Bebas Sewa	
	• Sewa/Kontrak	
	• Dinas	
	• Lainnya	
	Jumlah Sub 1.b)	
2.	Rumah Semi Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	• Bebas Sewa	
	• Sewa/Kontrak	
	• Dinas	
	• Lainnya	
	Jumlah Sub 2.b)	
3.	Rumah Tidak Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	• Bebas Sewa	
	• Sewa/Kontrak	
	• Dinas	
	• Lainnya	
	Jumlah Sub 3.b)	
	Total	

Sumber: ...

d. Aspek Legalitas Tanah untuk MBR

No	Aspek Legalitas Tanah untuk MBR	Jumlah
		KK
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah MBR yang menghuni rumah dan tanahnya telah bersertifikat	
2.	Jumlah MBR yang menghuni rumah dan tanahnya belum bersertifikat tetapi secara hukum syah (legal)	
3.	Jumlah MBR yang menghuni rumah tetapi tanahnya secara hukum tidak syah (<i>illegal</i>)	

Sumber: ...

e. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

No.	Nama Rusunawa	Peruntukan	Instansi Pembangun	Tahun Pembangunan	Pemilik Lahan	Luas Lahan	Instansi Pengelola	Jumlah		Jumlah Unit/Tipe		...
						Ha		Blok	Lantai	Tipe	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10a)	(10b)	(11)
1.												
2.												
dst.												

...	Tarif Sewa/Bulan	Tingkat Penghunan (%)	Ketersediaan PSU					Operasional dan Pemeliharaan		Catatan Tambahan
			Air Bersih	Listrik	Jalan Akses	Sanitasi	Drainase	Kondisi Bangunan	Kondisi PSU	
(10b)	(11)	(12)	(13a)	(13b)	(13c)	(13d)	(13e)	(14)	(15)	(16)

Sumber: ...

f. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)/Apartemen

No.	Nama Rusunami/Apartemen	Kategori Bangunan	Developer	Tahun Pembangunan	Pemilik Lahan	Luas Lahan	Jumlah		Jumlah Unit/Tipe		...
						Ha	Tower	Lantai	Tipe	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8a)	(8b)	(9a)	(9b)	(10)
1.											
2.											
dst.											

...	Proporsi Jumlah Unit Bersubsidi (%)	Tingkat Pemilikan (%)	Catatan Tambahan
(9)	(10)	(11)	(12)

Sumber: ...

g. Rumah Khusus

No.	Nama/Jenis Rumah Khusus	Instansi Pembangun	Instansi Pengusul	Pemilik Lahan	Sumber Dana	Jumlah unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

Sumber: ...

K.3.2. Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman

Data jumlah dan jenis kawasan perumahan dan permukiman yang ada disertai dengan penjelasan detail dari masing-masing kawasan perumahan dan permukiman (termasuk rumah khusus, keterpaduan PSU, keserasian kawasan).

a. Kawasan Skala Besar

No.	Kawasan Skala Besar	Jumlah Kawasan yang		
		telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya
		kawasan (3a)	kawasan (3b)	kawasan (3c)
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
1.	Kasiba			
2.	Lisiba			
3.	Lisiba BS			
	Jumlah			

Data per kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kasiba/Lisiba BS)

a.1. Nama Kawasan Skala Besar :

- i. Lokasi :
 - a. Provinsi
 - b. Kabupaten/Kota
 - c. Kecamatan
 - d. Kelurahan
 - e. Luas Ha
- ii. Hunian : a. Jumlah

Penduduk = jiwa

 - b. Jumlah Rumah Tangga = RT
 - c. Jumlah Kepala Keluarga = KK
 - d. Jumlah Bangunan Rumah = unit
- iii. Penetapan :
 - a. Diresmikan pada Tahun.....
 - b. No

mor Ketetapan
- iv.S

umber Dana Pembangunan Kawasan Skala Besar :

v. Tahapan Pembangunan

v.1. Penetapan Lokasi Kawasan Skala Besar

Kelayakan Ekonomi

1. Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data BPS :

- a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan

2. Analisis tingkat kebutuhan akan rumah :

- a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan

3. Sosialisasi mengenai pembangunan Kawasan Skala Besar kepada kelompok sasaran :

- a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan

Kelayakan Teknis

4. Topografi kawasan :

<input type="checkbox"/> a. Datar	<input type="checkbox"/> b. Berkontur
-----------------------------------	---------------------------------------
5. Kondisi drainase alam :

<input type="checkbox"/> a. Baik	<input type="checkbox"/> b. Kurang Baik
----------------------------------	---
6. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :

<input type="checkbox"/> a. Kurang dari 30 menit	<input type="checkbox"/> b. Lebih dari 30 menit
--	---
7. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :

<input type="checkbox"/> a. Tersedia	<input type="checkbox"/> b. Tidak tersedia
--------------------------------------	--
8. Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :

<input type="checkbox"/> a. Baik	<input type="checkbox"/> b. Kurang Baik
----------------------------------	---
9. Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :

<input type="checkbox"/> a. Dekat	<input type="checkbox"/> b. Jauh
-----------------------------------	----------------------------------

Kelayakan Pendanaan

10. Analisis estimasi biaya pengembangan Kawasan Skala Besar :

<input type="checkbox"/> a. Sudah dilakukan	<input type="checkbox"/> b. Belum dilakukan
---	---
11. Perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kawasan Skala Besar (*cashflow*) :

<input type="checkbox"/> a. Sudah dilakukan	<input type="checkbox"/> b. Belum disusun
---	---

Perencanaan Teknis

12. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Skala Besar :

<input type="checkbox"/> a. Ada	<input type="checkbox"/> b. Tidak ada
---------------------------------	---------------------------------------
13. Rencana perolehan lahan :

<input type="checkbox"/> a. Sudah dilakukan	<input type="checkbox"/> b. Belum disusun
---	---
14. DED prasarana primer/sekunder lokal :

<input type="checkbox"/> a. Ada	<input type="checkbox"/> b. Tidak ada
---------------------------------	---------------------------------------

v.2. Perolehan Tanah

1. Status tanah lokasi Kawasan Skala Besar :

<input type="checkbox"/> a. Tanah negara bebas	<input type="checkbox"/> e. Tanah instansi pemerintah
<input type="checkbox"/> b. Tanah negara okupasi	<input type="checkbox"/> f. Tanah hak menurut UUPA
<input type="checkbox"/> c. Tanah negara bekas hak	<input type="checkbox"/> g. Tanah bekas milik adat
<input type="checkbox"/> d. Tanah hak	<input type="checkbox"/> h. Tanah ulayat
2. Perolehan tanah untuk lokasi Kawasan Skala Besar melalui :

<input type="checkbox"/> a. Konsolidasi	<input type="checkbox"/> c. Jual beli
<input type="checkbox"/> b. Tukar menukar	<input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ...
3. Kemudahan dalam perolehan ijin status hak atas tanah :

<input type="checkbox"/> a. Ada (tuliskan) Bentuk kemudahan :	<input type="checkbox"/> b. Tidak ada
---	---------------------------------------

v.3. Badan Pengelola

1. Keberadaan Badan Pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :

<input type="checkbox"/> a. Ada	<input type="checkbox"/> b. Belum ada (Langsung ke no.5)
---------------------------------	--
2. Bentuk badan usaha pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :

- a. BUMN
- b. BUMD
- c. Konsorsium dengan Badan Usaha Swasta
- d. Lainnya (tuliskan) : ...

3. Sertifikasi tenaga ahli yang dimiliki oleh Badan Pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS (*checklist*) :

- a. Bidang manajemen real estat
- b. Bidang penyelenggaraan pembangunan PSU lingkungan
- c. Bidang pembiayaan real estat
- d. Bidang lainnya (tuliskan) : ...

4. Substansi rencana teknis pengembangan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS yang dimiliki oleh Badan Pengelola (*checklist*) :

- a. Macam/tipe dan jumlah rumah yang dapat dibangun
- b. Prakiraan harga jual tanah untuk masing-masing tipe rumah
- c. Sistem jaringan jalan
- d. Rencana struktur pemanfaatan ruang
- e. Jadwal waktu penyelenggaraan pengelolaan kawasan
- f. Sistem drainase dan pembuangan limbah cair
- g. Macam dan jumlah sarana lingkungan yang akan disediakan tanahnya
- h. Jaringan utilitas umum
- i. Sistem pembuangan limbah padat (sampah)

5. Penyebab belum terbentuknya Badan Pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS (*checklist*) :

- a. Belum ada badan usaha yang dapat memenuhi kriteria Badan Pengelola Kasiba yang ditetapkan
- b. Kurangnya fasilitasi pembentukan Badan Pengelola dari Pemerintah Pusat
- c. Kurangnya sosialisasi/promosi Kasiba di daerah
- d. Lainnya (tuliskan) : ...

v.4. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Skala Besar:

1. Keberadaan RRTR Kawasan Skala Besar :

- a. Ada
- b. Tidak ada

2. Pemenuhan kriteria RRTR Kawasan Skala Besar (*checklist*) :

- a. Mengacu kepada RTRW Kab/Kota
- b. Memperhatikan kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang dimungkinkan berkembang di Kawasan Skala Besar
- c. Mengacu kepada RP4D Kab/Kota
- d. Memperhatikan keterpaduan prasarana kawasan dan prasarana wilayah

3. Sumber dana penyusunan RRTR Kawasan Skala Besar (*checklist*) :

- a. APBN
- b. APBD
- c. Badan Pengelola
- d. Lainnya (tuliskan) : ...

v.5. Penerapan Hunian Berimbang

1. Rencana dan realisasi pembangunan rumah pada Kawasan Skala Besar :

Rencana Pembangunan			Realisasi		
RSH	R.Mngh	R. Mwh	RSH	R.Mngh	R. Mwh
unit	unit	unit	unit	unit	unit

2. Permasalahan dan usulan terkait penerapan Hunian Berimbang :

.....

.....

.....

vi. Lain-lain

vi.1. Pembinaan

1. Serah terima Kasiba/Lisiba/Lisiba BS kepada Pemerintah Daerah :
 a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan
Alasan (tuliskan) : ...
2. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pengelola (*checklist*) :
 a. Pengaturan d. Penelitian dan pengembangan
 b. Bimbingan atau pendampingan e. Perencanaan dan pelaksanaan
 c. Pemberian bantuan dan kemudahan f. Pengawasan dan pengendalian
3. Bentuk-bentuk pengendalian Kasiba/Lisiba/Lisiba BS yang dilakukan oleh Pemda (*checklist*) :
 a. Pengawasan perolehan tanah dan pembangunan fisik
 b. Penertiban terhadap perolehan tanah dan pembangunan fisik
 c. Lainnya (tuliskan) : ...

vi.2. Pelaporan

1. Pelaporan oleh Badan Pengelola terkait pengelolaan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :
 a. Dilakukan b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) : ...
2. Frekuensi pelaporan (apabila ada) :
 a. Sekali dalam sebulan d. Sekali dalam setahun
 b. Sekali dalam tiga bulan e. Lainnya (tuliskan) : ...
 c. Sekali dalam enam bulan
3. Pelaporan disampaikan kepada (bisa lebih dari satu) :
 a. Pemerintah Pusat c. Pemerintah Kabupaten/Kota
 b. Pemerintah Provinsi d. Lainnya (tuliskan) : ...

vi.3. Penghunian

1. Tingkat hunian rumah di Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :
 a. < 25 % dari rumah yg terbangun c. 50 - 75% dari rumah yg terbangun
 b. 25 - 50% dari rumah yg terbangun d. > 75% dari rumah yg terbangun

vi.4. Promosi Investasi Pengembangan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS

1. Promosi Kasiba/Lisiba/Lisiba BS kepada para investor dan pengembang :
 a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan
2. Kegiatan promosi yang sudah dilakukan :
 a. < 3 kali c. 6 – 8 kali
 b. 3 – 5 kali d. > 8 kali

vi.5. Pemasaran (khusus apabila ada pengembangan oleh Developer)

1. Tingkat penjualan unit rumah di Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :
 a. < 25 % dari target rencana c. 50 - 75% dari target rencana
 b. 25 - 50% dari target rencana d. > 75% dari target rencana
2. Tingkat hunian rumah di Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :
 a. < 25 % dari rumah yg terjual c. 50 - 75% dari rumah yg terjual
 b. 25 - 50% dari rumah yg terjual d. > 75% dari rumah yg terjual
3. Fasilitas KPR :

a. Ada, dari (tuliskan) : ...

b. Tidak ada, alasan (tuliskan) : ...

vii. Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)

a.2. Nama Kawasan Skala Besar :

dst.

b. Kawasan Khusus

No.	Kawasan Khusus	Jumlah Kawasan yang		
		telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya
		kawasan	kawasan	kawasan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
I. Kepentingan Ekonomi				
1.	Industri			
2.	Pariwisata			
3.	Prasarana Komunikasi			
4.	Telekomunikasi			
5.	Pelabuhan			
6.	Perdagangan Bebas			
7.	Eksploitasi dan Konservasi Bahan Galian Strategis (Pengolah Sumber Daya Alam)			
8.	Pengembangan Teknologi Tinggi			
II. Kepentingan Non Ekonomi				
1.	Cagar Budaya			
2.	Taman Nasional			
3.	Pangkalan Militer			
4.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Nasional			
5.	Laboratorium Sosial			
6.	Lembaga Masyarakat Spesifik			
7.	Pulau-pulau Kecil/Pesisir			
8.	Perbatasan/Terluar			
9.	Tertinggal/Terpencil			
10.	Dampak/Pasca Bencana			
	Jumlah			

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Khusus)

b.1. Nama Kawasan Khusus :

i. Lokasi

- a. Provinsi
- b. Kabupaten/Kota
- c. Kecamatan
- d. Kelurahan
- e. Luas Ha

ii. Hunian : a. Jumlah
Penduduk = jiwa

- b. Jumlah Rumah Tangga = RT
- c. Jumlah Kepala Keluarga = KK
- d. Jumlah Bangunan Rumah = unit

iii. Penetapan

- a. Diresmikan pada Tahun.....
- b. No mor Ketetapan

iv.S

umber Dana Pembangunan Kawasan Khusus :

v. Tahap Persiapan

v.1. Tahap Penetapan Lokasi

1. Pemenuhan persyaratan lokasi perumahan (*checklist*) :

- a. Sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota
- b. Sesuai dengan RP4D
- c. Tidak terletak pada lahan beririgasi teknis
- d. Serasi dan terpadu dengan kawasan di sekitarnya
- e. Terkait dengan fungsi khusus kawasan
- f. Aman dari bencana alam
- g. Dapat diakses dengan mudah

2. Pemenuhan kriteria lokasi perumahan (*checklist*) :

- a. Jumlah unit rumah yang dapat ditampung minimal 100 unit (horizontal/vertikal)
- b. Diperuntukkan bagi masyarakat yang bekerja/terkait dengan sektor tertentu di kawasan khusus
- c. Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung sesuai standar
- d. Memperhatikan daya dukung lahan (kekuatan tanah, air tanah, daya serap tanah)
- e. Tidak mencemari air, tanah, dan udara
- f. Tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar kawasan perumahan
- g. Kejelasan status tanah dan kepemilikannya

3. Status tanah lokasi perumahan kawasan khusus :

- a. Tanah negara bebas
- b. Tanah negara bekas tanah hak
- c. Tanah ulayat
- d. Tanah negara yang dikuasai Pemda

4. Perolehan tanah untuk lokasi perumahan kawasan khusus :

- a. Konsolidasi tanah
- b. Tukar menukar
- c. Jual beli
- d. Pelepasan hak
- e. Hibah

v.2. Pembentukan Badan Penyelenggara dan Pengelola

1. Badan penyelenggara dan pengelola perumahan khusus :

- a. Ada
- b. Tidak ada

2. Bentuk badan penyelenggara dan pengelola perumahan kawasan khusus :

- a. Salah satu unit kerja pada Dinas Daerah
- b. Badan Usaha
- c. Kelompok masyarakat yang berbadan hukum

vi.Ta

hap Perencanaan

vi.1. Pra studi terhadap kelayakan investasi dan pendanaan

1. Kajian *supply demand* perumahan :

- a. Sudah dilakukan
- b. Belum dilakukan

2. Identifikasi sumber-sumber pendanaan :

- a. Sudah dilakukan
- b. Belum dilakukan

3. Kajian kelayakan lokasi (teknis, lingkungan, sosial budaya, administratif) :

- a. Sudah dilakukan
- b. Belum dilakukan

vi.2. Pemetaan partisipatif

1. Sosialisasi terhadap masyarakat yang akan tinggal di perumahan kawasan khusus :

<input type="checkbox"/> a. Sudah dilakukan	<input type="checkbox"/> b. Belum dilakukan
---	---
2. Bentuk sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Penyuluhan
<input type="checkbox"/> b. Penyebarluasan dan pemasyarakatan secara terpadu
<input type="checkbox"/> c. Penggalangan dan pengorganisasian masyarakat

vi.3. Penyusunan rencana penyelenggaraan

1. Perencanaan fisik ruang kawasan yang sudah disusun oleh penyelenggara kawasan meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. RDTR Kawasan	<input type="checkbox"/> d. Prioritas pembangunan satuan perumahan
<input type="checkbox"/> b. RTR Kawasan	<input type="checkbox"/> e. Rencana dan tahapan pembangunan fisik
<input type="checkbox"/> c. AMDAL	<input type="checkbox"/> f. Perencanaan fisik ruang kawasan belum ada
2. Perencanaan penyediaan tanah yang sudah disusun oleh penyelenggara kawasan meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Rencana konsolidasi tanah	<input type="checkbox"/> c. Rencana pembebasan tanah
<input type="checkbox"/> b. Rencana hibah	<input type="checkbox"/> d. Perencanaan penyediaan tanah belum ada
3. Perencanaan penyediaan PSU kawasan yang sudah disusun oleh penyelenggara kawasan meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Gambar kerja prasarana	<input type="checkbox"/> d. Gambar kerja pematangan tanah
<input type="checkbox"/> b. Gambar kerja sarana	<input type="checkbox"/> e. Gambar kerja prototype rumah
<input type="checkbox"/> c. Gambar kerja utilitas umum	<input type="checkbox"/> f. Laporan penelitian tanah dan air dari instansi yang berkompeten
4. Perencanaan penyediaan PSU kawasan yang sudah disusun oleh penyelenggara perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Gambar kerja prasarana	<input type="checkbox"/> d. Gambar kerja pematangan tanah
<input type="checkbox"/> b. Gambar kerja sarana	<input type="checkbox"/> e. Gambar kerja prototype rumah
<input type="checkbox"/> c. Gambar kerja utilitas umum	<input type="checkbox"/> f. Laporan penelitian tanah dan air dari instansi yang berkompeten

vi.4. Penyusunan rencana pengelolaan

1. Perencanaan skema pembiayaan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Penyusunan rincian biaya dan rencana jumlah kredit yang diajukan
<input type="checkbox"/> b. Penyusunan rencana anggaran biaya konstruksi dan operasional dan pemeliharaan PSU
<input type="checkbox"/> c. Penyusunan <i>cash flow</i> pembiayaan konstruksi dan operasi & pemeliharaan PSU
<input type="checkbox"/> d. Penyusunan skenario subsidi silang
2. Perencanaan penghunian yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Penyiapan calon penghuni	<input type="checkbox"/> c. Perumusan persyaratan penghuni
<input type="checkbox"/> b. Penyusunan kriteria penghunian	
3. Perencanaan pemanfaatan kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Penyusunan konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengelolaan termasuk SOP Pengelolaan
<input type="checkbox"/> b. Penyusunan rencana operasionalisasi penggunaan prasarana, sarana, dan utilitas
4. Perencanaan pemeliharaan kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Perencanaan kebersihan lingkungan	<input type="checkbox"/> c. Perencanaan keamanan lingkungan
---	---

b. Perencanaan penghijauan

5. Perencanaan pengendalian kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :

a. Penyusunan jadwal pengawasan dan penertiban

c. Penerbitan izin penggunaan bangunan

b. Perumusan insentif dan disinsentif

d. Perumusan sanksi

vii. Ta

hap Pemeliharaan dan Pengendalian

1. Pemeliharaan perumahan kawasan khusus :

a. Dilakukan

b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) : ...

2. Pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan perumahan kawasan khusus :

a. Dilakukan

b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) : ...

3. Bentuk pengawasan dan penertiban yang dilakukan terhadap pembangunan perumahan kawasan khusus (*checklist*) :

a. Pelaporan

c. Evaluasi

b. Pemantauan

d. Lainnya (tuliskan) : ...

viii. K

eterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)

b.2. Nama Kawasan Khusus :

dst.

c. Kawasan Non Skala Besar

Adalah kawasan perumahan dan permukiman yang tidak termasuk kategori Kawasan Skala Besar dan Kawasan Khusus.

No.	Nama Kawasan	Jumlah Kawasan yang		
		telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya
		kawasan	kawasan	kawasan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
1.	Komplek Perumahan ...			
2.				
dst.				
	Jumlah			

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Non Skala Besar)

c.1. Nama Kawasan Non Skala Besar :

i. Lokasi

a. Provinsi

b. Kabupaten/Kota

c. Kecamatan

d. Kelurahan

e. Luas Ha

ii. Hunian : a. Jumlah

Penduduk = jiwa

b. Jumlah Rumah Tangga = RT

c. Jumlah Kepala Keluarga = KK

d. Jumlah Bangunan Rumah = unit

- iii. Penetapan :
a. Diresmikan pada Tahun.....
b.....No
mor Ketetapan

iv.S

umber Dana Pembangunan Kawasan Non Skala Besar :

v. Tahapan Pembangunan

v.1. Penetapan Lokasi Kawasan Non Skala Besar

Kelayakan Ekonomi

1. Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data BPS :

- a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan

2. Analisis tingkat kebutuhan akan rumah :

- a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan

3. Sosialisasi mengenai pembangunan Kawasan Non Skala Besar kepada kelompok sasaran :

- a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan

Kelayakan Teknis

4. Topografi kawasan :

- a. Datar b. Berkontur

5. Kondisi drainase alam :

- a. Baik b. Kurang Baik

6. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :

- a. Kurang dari 30 menit b. Lebih dari 30 menit

7. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :

- a. Tersedia b. Tidak tersedia

8. Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :

- a. Baik b. Kurang Baik

9. Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :

- a. Dekat b. Jauh

Kelayakan Pendanaan

10. Analisis estimasi biaya pengembangan Kawasan Non Skala Besar :

- a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan

11. Perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kawasan Non Skala Besar (*cashflow*) :

- a. Sudah dilakukan b. Belum disusun

Perencanaan Teknis

12. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Non Skala Besar :

- a. Ada b. Tidak ada

13. Rencana perolehan lahan :

- a. Sudah dilakukan b. Belum disusun

14. DED prasarana primer/sekunder lokal :

- a. Ada b. Tidak ada

v.2. Perolehan Tanah

- Status tanah lokasi Kawasan Non Skala Besar :

<input type="checkbox"/> a. Tanah negara bebas	<input type="checkbox"/> e. Tanah instansi pemerintah
<input type="checkbox"/> b. Tanah negara okupasi	<input type="checkbox"/> f. Tanah hak menurut UUPA
<input type="checkbox"/> c. Tanah negara bekas hak	<input type="checkbox"/> g. Tanah bekas milik adat
<input type="checkbox"/> d. Tanah hak	<input type="checkbox"/> h. Tanah ulayat
- Perolehan tanah untuk lokasi Kawasan Non Skala Besar melalui :

<input type="checkbox"/> a. Konsolidasi	<input type="checkbox"/> c. Jual beli
<input type="checkbox"/> b. Tukar menukar	<input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ...
- Kemudahan dalam perolehan ijin status hak atas tanah :

<input type="checkbox"/> a. Ada (tuliskan) Bentuk kemudahan : ...	<input type="checkbox"/> b. Tidak ada
--	---------------------------------------

v.3. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Non Skala Besar:

- Keberadaan RRTR Kawasan Non Skala Besar :

<input type="checkbox"/> a. Ada	<input type="checkbox"/> b. Tidak ada
---------------------------------	---------------------------------------
- Pemenuhan kriteria RRTR Kawasan Non Skala Besar (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Mengacu kepada RTRW Kab/Kota	<input type="checkbox"/> c. Mengacu kepada RP4D Kab/Kota
<input type="checkbox"/> b. Memperhatikan kegiatan ekonomi, sosial budaya yang dimungkinkan berkembang di Kawasan Non Skala Besar	<input type="checkbox"/> d. Memperhatikan keterpaduan prasarana kawasan dan prasarana wilayah
- Sumber dana penyusunan RRTR Kawasan Non Skala Besar (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. APBN	<input type="checkbox"/> c. Badan Pengelola
<input type="checkbox"/> b. APBD	<input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ...

v.4. Penerapan Hunian Berimbang

- Rencana dan realisasi pembangunan rumah pada Kawasan Non Skala Besar :

Rencana Pembangunan			Realisasi		
RSH	R.Mngh	R. Mwh	RSH	R.Mngh	R. Mwh
unit	unit	unit	unit	unit	unit

- Permasalahan dan usulan terkait penerapan Hunian Berimbang :

.....

.....

.....

vi. Lain-lain

vi.1. Pembinaan

- Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pengelola (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Pengaturan	<input type="checkbox"/> d. Penelitian dan pengembangan
<input type="checkbox"/> b. Bimbingan atau pendampingan	<input type="checkbox"/> e. Perencanaan dan pelaksanaan
<input type="checkbox"/> c. Pemberian bantuan dan kemudahan	<input type="checkbox"/> f. Pengawasan dan pengendalian

2. Bentuk-bentuk pengendalian Kawasan Non Skala Besar yang dilakukan oleh Pemda (*checklist*) :

- a. Pengawasan perolehan tanah dan pembangunan fisik
- b. Penertiban terhadap perolehan tanah dan pembangunan fisik
- c. Lainnya (tuliskan) : ...

vi.2. Penghunian

1. Tingkat hunian rumah di Kawasan Non Skala Besar :

- a. < 25 % dari rumah yg terbangun
- b. 25 - 50% dari rumah yg terbangun
- c. 50 - 75% dari rumah yg terbangun
- d. > 75% dari rumah yg terbangun

vi.3. Pemasaran (khusus apabila ada pengembangan oleh Developer)

1. Tingkat penjualan unit rumah di Kawasan Non Skala Besar :

- a. < 25 % dari target rencana
- b. 25 - 50% dari target rencana
- c. 50 - 75% dari target rencana
- d. > 75% dari target rencana

2. Tingkat hunian rumah di Kawasan Non Skala Besar :

- a. < 25 % dari rumah yg terjual
- b. 25 - 50% dari rumah yg terjual
- c. 50 - 75% dari rumah yg terjual
- d. > 75% dari rumah yg terjual

3. Fasilitas KPR :

- a. Ada, dari (tuliskan) : ...
- b. Tidak ada, alasan (tuliskan) : ...

vii. Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)

c.2. Nama Kawasan Non Skala Besar :

dst.

d. Kawasan Kumuh

No.	Nama Kawasan	Tingkat Kekumuhan (Gunakan Ö)		
		Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
1.	Komplek Perumahan ...			
2.				
dst.				

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Kumuh)

d.1. Nama Kawasan Kumuh :

i. Lokasi

- a. Provinsi
- b. Kabupaten/Kota
- c. Kecamatan
- d. Kelurahan
- e. Luas Ha

ii. Hunian : a. Jumlah

- Penduduk = jiwa
- b. Jumlah Rumah Tangga = RT
- c. Jumlah Kepala Keluarga = KK
- d. Jumlah Bangunan Rumah = unit

iii. SK Penetapan

- a. Tahun

b.....No

mor Ketetapan

iv. **Dokumentasi (dilampirkan foto-foto lapangan)**

v. **Kondisi Fisik Dasar Lokasi**

1. Bentuk lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh :
 a. Mengelompok (*cluster*) b. Terpencar (*scattered*)
2. Peruntukan dalam RTRW Kab/Kota :
 a. Hunian b. Lainnya (tuliskan): ...
3. Status tanah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh :
 a. Tanah negara bebas e. Tanah instansi pemerintah
 b. Tanah negara okupasi f. Tanah hak menurut UUPA
 c. Tanah negara bekas hak g. Tanah bekas milik adat
 d. Tanah hak h. Tanah ulayat
4. Topografi kawasan :
 a. Datar b. Berkontur
5. Kondisi drainase alam :
 a. Baik b. Kurang Baik

vi. **Jangkauan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas**

1. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :
 a. Kurang dari 30 menit b. Lebih dari 30 menit
2. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :
 a. Tersedia b. Tidak tersedia
3. Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :
 a. Baik b. Kurang Baik
4. Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :
 a. Dekat b. Jauh

vii. **Tingkat Kekumuhan**

Kependudukan

1. Tingkat kepadatan penduduk :
 a. > 700 jiwa/hektar e. 301 – 400 jiwa/hektar i. 76 – 100 jiwa/hektar
 b. 601 – 700 jiwa/hektar f. 201 – 400 jiwa/hektar j. 51 – 75 jiwa/hektar
 c. 501 – 600 jiwa/hektar g. 151 – 200 jiwa/hektar k. 26 – 50 jiwa/hektar
 d. 401 – 500 jiwa/hektar h. 101 – 150 jiwa/hektar l. < 26 jiwa/hektar
2. Jumlah rata-rata KK/rumah :
 a. > 4 KK/rumah c. 3 KK/rumah e. 1 KK/rumah
 b. 4 KK/rumah d. 2 KK/rumah
3. Tingkat pertumbuhan penduduk/tahun :
 a. > 2,5 % c. 1,6 – 2,0 % e. < 1,1 %
 b. 2,1 – 2,5 % d. 1,1 – 1,5 %

Kondisi Bangunan

4. Tingkat kualitas struktur bangunan (persentase jumlah rumah semi dan tidak permanen terhadap total rumah) :
 a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %

b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

5. Tingkat kepadatan bangunan :

a. > 200 unit/hektar c. 101 – 150 unit/hektar e. < 51 unit/hektar
 b. 151 – 200 unit/hektar d. 51 – 100 unit/hektar

6. Tingkat kerusakan rumah (persentase jumlah rumah rusak terhadap total rumah) :

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

Kondisi Prasarana, Sarana & Utilitas

7. Tingkat pelayanan air bersih (persentase jumlah KK yang tidak terlayani air bersih terhadap total KK) :

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

8. Kondisi sanitasi lingkungan (persentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban terhadap total KK) :

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

9. Kondisi pelayanan persampahan (persentase jumlah KK yang sampahnya belum terlayani terhadap total KK) :

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

10. Kondisi saluran air hujan/drainase : (jika memiliki drainase, maka persentase panjang drainase yang tidak lancar/tersumbat terhadap total panjang drainase, dan jika tidak memiliki drainase, maka persentase luasan air limpasan (*run off*) terhadap badan jalan)

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

11. Kondisi jalan rusak berat (persentase panjang jalan rusak berat terhadap panjang jalan total) :

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

12. Kondisi jalan rusak sedang (persentase panjang jalan rusak sedang terhadap panjang jalan total) :

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

13. Kondisi jalan rusak ringan (persentase panjang jalan rusak ringan terhadap panjang jalan total) :

a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %

14. Ruang terbuka (persentase luas ruang terbuka terhadap luas seluruh kawasan perumahan dan permukiman) :

a. < 2,5 % c. 5,1 – 7,5 % e. > 10 %
 b. 2,5 – 5,0 % d. 7,6 – 10 %

Permasalahan Sosial Masyarakat

15. Tingkat pendapatan (persentase jumlah penduduk berpenghasilan di bawah upah minimum terhadap total penduduk kawasan perumahan dan permukiman) :

a. > 35 % c. 16 – 25 % e. < 6 %
 b. 26 – 35 % d. 6 – 15 %

16. Tingkat pendidikan (persentase jumlah penduduk yang tidak tamat wajib belajar 9 tahun terhadap jumlah penduduk)
- a. > 15 % c. 6 – 10 % e. < 1 %
 b. 11 – 15 % d. 1 – 5 %
17. Tingkat kerawanan kriminal (jumlah tindakan kriminal dalam satu tahun) :
- a. > 6 kali/tahun c. 3 – 4 kali/tahun e. tidak ada
 b. 5 – 6 kali/tahun d. 1 – 2 kali/tahun
18. Status gizi balita (persentase jumlah balita yang kurang gizi terhadap jumlah keseluruhan balita) :
- a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %
19. Angka kesakitan demam berdarah (persentase jumlah penderita demam berdarah dalam setahun terhadap jumlah penduduk) :
- a. > 20 % c. 11 – 15 % e. < 6 %
 b. 16 – 20 % d. 6 – 10 %
20. Angka kesakitan diare (persentase jumlah penderita diare dalam setahun terhadap jumlah penduduk) :
- a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %
21. Angka kesakitan ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) (persentase jumlah penderita ISPA dalam setahun terhadap jumlah penduduk) :
- a. > 70 % c. 31 – 50 % e. < 11 %
 b. 51 – 70 % d. 11 – 30 %
22. Frekuensi kebakaran per tahun:
- a. > 6 kali/tahun c. 3 – 4 kali/tahun e. tidak ada
 b. 5 – 6 kali/tahun d. 1 – 2 kali/tahun
23. Frekuensi banjir per tahun :
- a. > 6 kali/tahun c. 3 – 4 kali/tahun e. tidak ada
 b. 5 – 6 kali/tahun d. 1 – 2 kali/tahun
24. Frekuensi tanah longsor per 3 tahun :
- a. > 6 kali/3 tahun c. 3 – 4 kali/3 tahun e. tidak ada
 b. 5 – 6 kali/3 tahun d. 1 – 2 kali/3 tahun

viii. **Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh**

1. Rekomendasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh :
- a. Perbaikan dan pemugaran c. Pengelolaan & pemeliharaan berkelanjutan
 b. Peremajaan d. Lainnya (tuliskan) : ...
2. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh :
- a. Sudah ditangani b. Belum ditangani
Sebutkan :
1.
2.
3. Pelaksana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh :
- a. Pemerintah Pusat c. Pemerintah Kab/Kota
 b. Pemerintah Provinsi d. Lainnya (tuliskan) : ...

4. Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh (RTBL/Rencana rinci tata ruang lainnya) yang telah/sedang disusun :

a. Ada b. Tidak ada

5. DED prasarana primer/sekunder lokal :

a. Ada b. Tidak ada

ix. Lain-lain

1. Efektifitas pelaksanaan program penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan :

a. Mengurangi permasalahan b. Kurang efektif, alasan (tuliskan) : ...

2. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh (*checklist*):

a. Bimbingan atau pendampingan c. Perencanaan dan pelaksanaan

b. Pemberian bantuan dan kemudahan d. Pengawasan dan pengendalian

3. Bentuk-bentuk pengendalian untuk mencegah bertambahnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemda (*checklist*) :

a. Pengawasan pembangunan fisik c. Lainnya, (tuliskan) : ...

b. Penertiban terhadap pembangunan fisik

x. Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)

d.2. Nama Kawasan Kumuh :

dst.

e. Keterpaduan PSU Kawasan

(Bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah dan jenis Kawasan yang ada)

PENDATAAN		√	KETERANGAN
A	Luas Kawasan		
	1 Luas Kawasan	Ha
	2 Luas area yang masih kosong	Ha
B	Perencanaan Kawasan Perumahan		
	1 Rencana Tata Ruang Rinci Kawasan		Ada Tidak ada
	2 Rencana Induk Sistem Keterpaduan PSU		Ada Tidak ada
	3 Studi kelayakan untuk mendukung rencana induk sistem yang ada		Ada Tidak ada
C	Pengelolaan Kawasan Perumahan		
	1 Serah terima PSU		Sudah Belum
	2 Pemeliharaan (bisa lebih dari satu)		Pemkab/Pemkot Badan Pengelola/Pengembang Koperasi Swadaya Lainnya, (sebutkan) ...
D	Prasarana		

PENDATAAN		√	KETERANGAN
	1	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Jalan dalam Kawasan	Ada
			Tidak ada
		a. Jalan penghubung dengan wilayah sekitar	Ada
			Tidak ada
		b. Status jalan penghubung	Jalan Kabupaten/Kota
		Jalan Provinsi	
		Jalan Nasional	
	c. Jalan lokal sekunder	... meter	
	2	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Drainase dalam Kawasan	Ada
			Tidak ada
		a. Saluran drainase primer	Ada
			Tidak ada
		b. Saluran drainase sekunder	Ada
			Tidak ada
		c. Sumur Resapan	Ada
			Tidak ada
		d. Kolam Retensi	Ada
			Tidak ada
	e. Polder	Ada	
		Tidak ada	
f. Pompa	Ada		
	Tidak ada		
3	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Air Minum dalam Kawasan	Ada	
		Tidak ada	
	a. PDAM	Ada	
		Tidak ada	
	b. Sumur Pompa	Ada	
		Tidak ada	
	c. Pompa Tangan	Ada	
		Tidak ada	
4	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Air Limbah dalam Kawasan	Ada	
		Tidak ada	
	a. Sistem Pengolahan Setempat (<i>on-site</i>)	Ada	
		Tidak ada	
	b. Sistem Pengolahan Terpusat (<i>off-site</i>)	Ada	
		Tidak ada	
5	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Pengelolaan Sampah dalam Kawasan	Ada	
		Tidak ada	
	a. Pawadahan Individual	Ada	
		Tidak ada	
	b. Pawadahan Komunal	Ada	
		Tidak ada	
	c. Tempat pengolahan sampah sementara	Ada	
		Tidak ada	
d. Tempat pengolahan sampah akhir	Ada		
	Tidak ada		
E Sarana			
	1	Pendidikan	TK ... unit
			SD ... unit
			SMP ... unit
			SMA ... unit
			Perguruan Tinggi ... unit
	2	Kesehatan	Rumah Sakit ... unit
			Puskesmas ... unit
			Puskesmas Pembantu ... unit
			Klinik ... unit

PENDATAAN		√	KETERANGAN	
	3	Perdagangan	Posyandu	... unit
			Pasar Tradisional	... unit
			Tempat Pelelangan Ikan	... unit
			Pertokoan	... unit
			Minimarket	... unit
	4	Peribadatan	Warung	... unit
			Masjid	... unit
			Mushola	... unit
			Gereja	... unit
			Wihara	... unit
	5	Ruang Terbuka dan Olahraga	Pura	... unit
			RTH Skala Lingkungan	
			RTH Skala Kawasan	
			Lapangan olahraga Gedung olahraga	
	6	Pemerintahan	Balai Desa	
			Kantor Kepala Desa/ Lurah	
			Kantor Camat	
			Pos Keamanan	
	7	Pemakaman	Umum (dikelola pemerintah)	
			Khusus (dikelola selain pemerintah)	
8	Pendukung Transportasi	Terminal		
		Halte		
		Dermaga		
		Stasiun		
F Utilitas				
1	Jaringan listrik	Ada		
		Tidak ada		
2	Jaringan telepon	Ada		
		Tidak ada		
3	Jaringan gas	Ada		
		Tidak ada		
4	Pemadam Kebakaran	Ada		
		Tidak ada		
5	Jalur transportasi umum	Ada		
		Tidak ada		
6	Transportasi umum internal kawasan	Becak /Bentor		
		Ojeg		
		Lainnya, (sebutkan) ...		
7	Transportasi umum eksternal kawasan	Angkutan Perkotaan	... trayek	
		Angkutan AKDP	... trayek	
		Angkutan AKAP	... trayek	

K.4. DATA BENCANA DI KABUPATEN/KOTA

No.	Jenis Bencana	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Rata-rata Frekuensi Bencana	
			dalam 1 tahun	dalam 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)
1.				
2.				
dst				